

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan persoalan yang akrab dengan wilayah perkotaan. Kota yang pergerakannya lebih dinamis dan lebih kompleks tanpa disadari juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup para penduduk kota itu sendiri, seperti halnya persoalan sampah yang telah menjadi permasalahan sejak dulu. Bertautan dengan hal tersebut, penurunan kualitas lingkungan hingga dampak kesehatan yang ditimbulkan tidak terlepas dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat, *life style* dan pola perilaku yang cenderung tidak ramah terhadap kelestarian lingkungan. Merujuk data UN-MEA atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) tahun 2006 mengungkapkan bahwasanya kurang lebih 70 persen dari 64 juta ton per hari produk buangan yang dihasilkan masyarakat perkotaan tidak dapat ditangani seutuhnya.<sup>1</sup>

Sebagai satu kesatuan wilayah administratif, dengan geliat ekonomi yang menampilkan tren positif, eksplisit berimplikasi terhadap laju pertumbuhan penduduk Kota Padang. Tercatat berdasarkan hasil sensus, populasi masyarakat Kota Padang pada tahun 1980 ialah 480. 607 jiwa, tahun 1986 mencapai 571.196 jiwa, hingga tiga tahun berikutnya menyentuh angka 632.609 jiwa.<sup>2</sup> Eskalasi tersebut cukup tinggi jika disandingkan dengan beberapa kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, seperti Kota

---

<sup>1</sup> Ade Fia Rahmawati, dkk., "Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia", *Jurnal*, Bina Gogik Vol. 8 No. 1, (Aceh, STKIP Bina Bangsa Meulaboh, 2021), hlm. 4-5.

<sup>2</sup> Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Padang, *Pengelolaan Sampah di Kotamadya Padang*, (Padang: Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II, 1990), hlm 6.

Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Bukittinggi dalam angka tahun 1980 memiliki total penduduk sebesar 70.691 jiwa, sedangkan tahun 1986 meningkat menjadi 75.450 jiwa, dan tahun 1989 mencapai angka 77.197 jiwa. Sementara itu Kota Payakumbuh yang tercatat berdasarkan registrasi penduduk tahun 1980 yaitu 78.789 jiwa, tahun 1986 sebanyak 85.403 jiwa, dan tahun 1989 sebesar 87.980 jiwa.<sup>3</sup>

Tumbuhnya kota menjadi ruang hidup padat penduduk tidak jarang memberikan konsekuensi logis terhadap kesenjangan ekonomi, kemiskinan, munculnya kawasan pemukiman kumuh, hingga sikap negatif berupa tindakan indisipliner yang berdampak terhadap kondisi lingkungan. Polemik ini perlu diatasi dengan sebaik-baiknya, oleh sebab itu dibutuhkan semacam regulasi atau aturan hingga kebijakan yang sifatnya mengikat sampai keterlibatan setiap komponen penduduk kota untuk mengatasi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Adapun di masa pemerintahan Hasan Basri Durin selaku Walikota Padang (1973-1983), kala itu pemerintah dihadapkan dengan berbagai polemik. Polemik tersebut mulai dari penyerobotan tanah, maraknya pembangunan liar, hingga minimnya kesadaran masyarakat perihal pembuangan sampah.<sup>5</sup> Menggaet camat dan kepala kampung serta bersinergi bersama kodim dan kepolisian, pemerintah kota selanjutnya berkolaborasi

---

<sup>3</sup> BPS Provinsi Sumatera Barat, Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (Jiwa), (<https://sumbar.bps.go.id/indicator/12/32/14/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022, pukul 16.58 WIB).

<sup>4</sup> Zudan Arif Fakrulloh dan Endar Rus Wismulyani, *Permasalahan Penduduk Kota*, (Klaten: Cempaka Putih, 2016), hlm. 6-13.

<sup>5</sup> Hasan Basri Durin, "Penyusunan Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kotamadya Padang", *Working Paper* pada agenda Musyawarah Dewan Pimpinan (Musdep) BKS-AKSI ke VII 13 s/d 16 Oktober 1976 di Banjarmasin, hlm. 4.

menjalankan program K3 (Ketertiban, Kebersihan, Keindahan).<sup>6</sup> Implementasi dari program tersebut tidak lain bertujuan membenahi seluruh aspek kehidupan kota.<sup>7</sup> Di samping itu pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RK) menjadi ujung tombak penggerak masyarakat agar dapat berkontribusi aktif mendukung pelaksanaan program K3.<sup>8</sup>

Memasuki era pemerintahan Syahrul Ujud (1983-1993), melanjutkan program pendahulu, selaku Walikota melakukan terobosan terkait intensifikasi program pengelolaan sampah. Limbah padat yang dihasilkan masyarakat semula disatukan dan dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya diletakkan di bak-bak sampah digantikan dengan sistem terpadu pembuangan langsung ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Upaya ini ditempuh sebagai bentuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan, karena mekanisme yang dijalankan sebelumnya dinilai kurang baik dan mengakibatkan sampah berserakan hingga menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Pembenahan penyelenggaraan persampahan dilakukan semaksimal mungkin dan kantong *asoi* dipilih sebagai medium pewadahan penampungan sampah. Setelah sampah terkumpul masyarakat dapat menaruhnya di depan rumah (pinggir jalan) untuk berikutnya diangkut petugas kebersihan ke kawasan pembuangan akhir.<sup>9</sup>

Penggunaan kantong *asoi* sebagai media pewadahan menawarkan beberapa kemudahan, yaitu efisiensi proses angkut-muat, mempersingkat waktu pengerjaan

---

<sup>6</sup> Hasril Chaniago dan Eko Yanche Edrie, *Hasan Basri Durin, Sebuah Otobiografi*, (Pekanbaru: Yayasan Citra Budaya Indonesia Padang, 2012), hlm. 152-153.

<sup>7</sup> Capaian dari program K3 yaitu dalam rangka mewujudkan Kota Padang yang tertib, bersih, dan indah. Pembenahan dilaksanakan melalui tertib bidang administrasi, pembangunan, lingkungan, hingga keteraturan sosial guna melahirkan fisik kota yang bersih dan indah, *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>9</sup> Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Padang (1990), *Op.cit.*, hlm. 34-35.

petugas, pemanfaatan ulang nilai guna, sampai usaha peningkatan masa sampah yang dapat diangkut menggunakan truk.<sup>10</sup> Keberhasilan kepemimpinan Shayrul Ujud menjadikan Kota Padang diapuk sebagai rujukan nasional mengenai pengelolaan sampah kota di Indonesia. Seminar “Pengelolaan Sampah Model Padang (SMP)” diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Kota Bukittinggi tahun 1985 dan diikuti 24 ibukota provinsi.<sup>11</sup> Pasca agenda tersebut kemudian diadakan lomba kebersihan antar kota dan berikutnya dikenal dengan Piala Adipura.<sup>12</sup>

Gayung bersambut, Pemerintahan Zuyen Rais (1994-2004) meneruskan kesuksesan menyabet prediket kota terbersih di Indonesia. Periode pertamanya pun kian berlangganan meraih piala adipura. Walaupun pada paruh kedua periode kepemimpinannya Kota Padang sempat terseok dan absen di beberapa kali kesempatan.<sup>13</sup>

Berlanjut pada masa Fauzi Bahar (2004-2014), pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) yang menasar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga masyarakat untuk menguatkan pelaksanaan K3. Fokus utama mengarah pada satuan unit kerja pemerintah guna bahu membahu mewujudkan Kota Padang bersih dan hijau.<sup>14</sup> Masih dalam konteks yang sama, satu tahun berselang keluar Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah yang di antaranya memuat ketentuan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Alimah Ibtihal, *Kepemimpinan Walikota Syahrul Ujud di Kota Padang Tahun 1983-1993, Skripsi*, (Padang: Jurusan Ilmu Sejarah, FIB Unand, 2018), hlm. 68.

<sup>12</sup> Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Padang (1990), *Op.cit.*, hlm. 47.

<sup>13</sup> Walneg S. Jas dan Windo Wibowo, *Padang di Persimpangan Jalan? Potretnya dahulu, Kini dan Visi Masa Depan*, (Jakarta: PT. Visi Media Nusantara, 2012), hlm. 61.

<sup>14</sup> Lihat *Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Daerah Menuju Kota Padang Bersih dan Hijau Tahun 2011-2014*.

mengenai penyediaan fasilitas bak sampah terpisah, organik-anorganik di kawasan pemukiman, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.<sup>15</sup>

Kait-mengait bersangkutan paut mengarah pada Program K3, pemerintahan Mahyeldi Ansharullah (2014-2019) perihal manajemen pengelolaan sampah mengeluarkan regulasi perihal jam-jam khusus bagi masyarakat yang hendak membuang sampah. Proses pembuangan hanya boleh dilakukan pada pukul 17.00-05.00 WIB di setiap TPS atau kontainer yang telah disediakan per kelurahan oleh pemerintah.

Menunjang program pemerintah kota Padang pada sub bidang pelayanan kebersihan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengenai Adipura, bab 1 pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwasanya “Adipura adalah instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan”.<sup>16</sup> Bertautan dengan peraturan tersebut pula bagian ketentuan umum ayat tiga menjelaskan “pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”.<sup>17</sup>

Menjadi program kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup (red: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang dijalin dengan tiap-tiap kepala pemerintah daerah mengenai bidang pengelolaan dan penataan

---

<sup>15</sup> Lihat *Peraturan Daerah Kota Padang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 21 Ayat 2.*

<sup>16</sup> Lihat *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Tentang Adipura.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

wilayah, termasuk di dalamnya membahas tentang pengelolaan jaringan persampahan, nyatanya berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Baik sosio-psikologis maupun estetika tata ruang kota dan kesehatan inilah yang kemudian melatar belakangi penulis mengangkat topik dengan judul “Pengelolaan Sampah di Kota Padang Tahun 1973-2019”.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini mengkaji mengenai sejarah pengelolaan jaringan sampah kota Padang di lima periode pemerintahan, yaitu dari masa jabatan Walikota era kepemimpinan Hasan Basri Durin hingga Mahyeldi Ansharullah. Batasan temporal pada penelitian ini yaitu rentang waktu 1973-2019. Tahun 1973 merupakan awal masa jabatan Walikota Hasan Basri Durin serta korelasinya dengan kondisi situasional perihal polemik kebersihan Kota Padang, upaya pembenahan baik dari segi regulasi, sarana-prasarana penunjang, serta hubungan sinergitas vertikal dari tingkat masyarakat sampai perangkat pemerintah kota. Sedangkan tahun 2019 menjadi batas akhir penelitian yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari empat puluh enam tahun perjalanan pengelolaan persampahan yang telah berlangsung. Bertautan dengan hal tersebut batasan spasial pada penelitian ini adalah Kota Padang pada umumnya guna memberikan gambaran perihal mekanisme pengelolaan sampah, dan secara khusus menyorot terkait problematika yang telah dihadapi dalam mengurai sirkulasi sampah. Problematika ini melingkupi hal-hal ataupun yang berkaitan dengan aspek sosial, teknis maupun kelembagaan dalam proses penataan kebersihan lingkungan kota.

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, diajukan beberapa pertanyaan untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana rekam jejak sentra pelayanan kebersihan di Kota Padang?
2. Bagaimana perkembangan pengelolaan persampahan di Kota Padang?
3. Apa problematika yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam mengurai sampah kota?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara ideal tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai riwayat badan/lembaga yang menaungi pengelolaan persampahan di kota Padang.
2. Bagaimana perkembangan pengelolaan persampahan di Kota Padang tahun 1973-2019.
3. Menganalisis mengenai permasalahan persampahan yang dihadapi Kota Padang dalam rentang waktu 1973-2019.

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai sejarah pengelolaan persampahan di Kota Padang. Diharapkan pula dapat berkontribusi terhadap penelitian terkait atau yang bersinggungan langsung dengan kebijakan terkait program kebersihan dan pengelolaan jaringan sampah kota. Penulis juga berharap penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan terhadap analisis dampak lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#### D. Tinjauan Pustaka

Bahan atau sumber yang menjadi rujukan dalam penulisan ini berupa buku, skripsi, jurnal, hingga arsip terbitan dari instansi pemerintah kota yang menjadi landasan menghasilkan narasi utuh berkenaan dengan topik penelitian. Persoalan terkait mekanisme pengelolaan sampah kota sejatinya telah banyak diterbitkan dan/atau diteliti dalam berbagai bidang keilmuan, antara lain buku terbitan dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) tentang “Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan”. Buku ini menjelaskan mengenai pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan persampahan, baik dari segi teknis, standarisasi operasional, keterjangkauan pelayanan, dan faktor lain terkait keberhasilan manajemen pengelolaan sampah.<sup>18</sup> Berdasarkan pada karya tersebut, penulis memperoleh pengetahuan mengenai kompleksitas pengelolaan sampah yang terpaut dengan kegiatan pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemilahan, hingga sampai ke tahap pemrosesan.

Kemudian rujukan lain yang digunakan adalah diktat kuliah Program Studi (Prodi) Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (ITB). Karya ini berperan dalam memberikan deskripsi perihal manajemen pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.<sup>19</sup> Melalui kajian sejarah, korelasi sumber ini

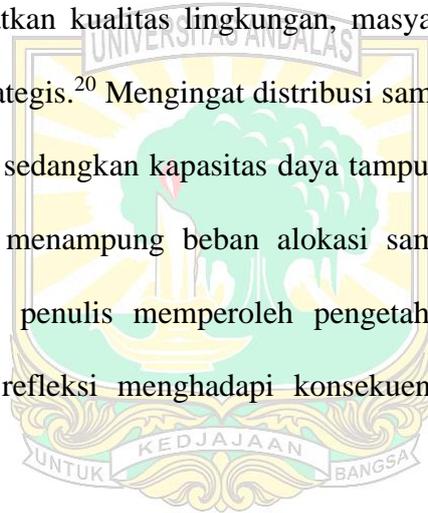
---

<sup>18</sup> Badan Standarisasi Nasional, “*Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*”, (Jakarta: BSN, 2002), hlm. 1-20.

<sup>19</sup> Enri Damanhuri dan Tri Padmi, “Pengelolaan Sampah”, *Diktat Kuliah TL-3104 Edisi 2010/2011*, (Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, 2010), hlm. 2.

yaitu digunakan sebagai kerangka acuan untuk mengetahui rangkaian atau proses penyelenggaraan persampahan yang berlangsung di kawasan perkotaan.

Berikutnya ialah penelitian yang digagas oleh Ismail Effendy dan Ira Putri Lan Lubis tentang “Manajemen Tata Kelola Sampah di Perkotaan”. Karya ilmiah ini mengulas perihal penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai upaya memperkecil masalah berdasarkan komponen sub-sistem yang saling terintegrasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, masyarakat hingga sumber daya, serta menunjang sektor strategis.<sup>20</sup> Mengingat distribusi sampah kota Padang terpusat di kawasan TPA Air Dingin, sedangkan kapasitas daya tampung dari berbagai kecamatan diprediksi hanya mampu menampung beban alokasi sampah hingga tahun 2026.<sup>21</sup> Berdasarkan hal tersebut, penulis memperoleh pengetahuan mengenai signifikansi sejarah sebagai medium refleksi menghadapi konsekuensi yang bisa saja muncul dikemudian hari.



Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ade Fia Rahmawati, dkk., mengenai “Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang problematika sampah kawasan perkotaan akibat pertumbuhan penduduk dengan geliat ekonomi yang bertautan dengan adanya peningkatan volume sampah.<sup>22</sup> Karena persoalan sampah tidak terlepas dari berbagai aspek yang menyertai, baik lingkungan, ekonomi, sosial, hingga persoalan teknis,

---

<sup>20</sup> Ismail Effendy dan Ira Putri Lan Lubis, “Manajemen Tata Kelola Sampah di Perkotaan”, *Jurnal, Regional Development Industry & Health Science (Technologi and Art of Life)* Vol. 1 No. 1, (Medan: Ready Star, 2018), hlm. 155.

<sup>21</sup> Top Satu, Areal Tampung TPA Air Dingin Terancam Penuh, Pemko Padang Tidak Bisa Berbuat Banyak, (<https://www.topsatu.com/areal-tampung-tpa-air-dingin-terancam-penuh-pemko-padang-tidak-bisa-berbuat-banyak/>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 13.12 WIB).

<sup>22</sup> Ade Fia Rahmawati, dkk., *Op.cit.*, hlm. 1.

kebijakan dan kelembagaan dalam mengatur skema pengelolaan berkelanjutan. Relevansi karya ini terhadap objek kajian penelitian yaitu penulis memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana hubungan antara mobilitas penduduk terhadap dampak pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dengan keterbatasan sarana fisik kota berdasarkan perspektif sejarah.

Berdasarkan uraian di atas, pembeda penelitian ini dibandingkan dengan karya ilmiah terdahulu terkait pengelolaan persampahan di Kota Padang terletak pada objek pembahasan. Hal ini dikarenakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berada di luar konteks sejarah. Artinya ulasan atau eksplorasi sumber dan riset menysasar pada kajian akademis dari sudut pandang ekonomi, sosiologi, kesehatan, dan lingkungan. Sedangkan penelitian ini mengarah kepada aspek kronologis atas riwayat pengelolaan persampahan yang telah berlangsung di Kota Padang sejak tahun 1973-2019.

#### **E. Kerangka Analitis**

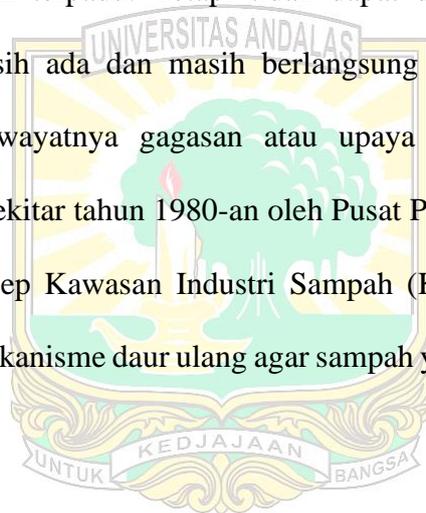
Sampah merupakan produk buangan hasil kegiatan manusia dan/atau proses alam yang dianggap tidak lagi memiliki nilai dan selanjutnya menjadi timbulan sampah. Menurut UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mendefenisikan bahwasanya sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>23</sup> Bertautan dengan hal tersebut, Gilbert dalam Komang Ayu (2008:19) mengklasifikasikan sampah menjadi dua golongan, organik dan anorganik. Sampah organik merupakan jenis sampah berbahan hayati yang sifatnya lebih mudah terurai, di antaranya seperti sampah makanan, sampah dapur, dan sampah rumah tangga. Sementara

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, hlm. 3.

itu sampah anorganik ialah kelompok sampah non hayati yang membutuhkan waktu lebih lama atau bahkan tidak dapat terurai secara keseluruhan dalam proses biologis yang dikenal dengan istilah *unbiodegradable*, adapun contoh dari sampah tersebut seperti berbahan dasar plastik, kaca, dan logam.<sup>24</sup>

Menilik penyelenggaraan persampahan dimasa sekarang sejatinya telah mengarah pada tujuan untuk meminimalisir dan mengendalikan dampak timbulan yang dihasilkan melalui sistem pengelolaan terpadu. Tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa pola kumpul-angkut-buang masih ada dan masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun demikian, berdasarkan riwayatnya gagasan atau upaya pembenahan di Indonesia sebenarnya telah muncul sekitar tahun 1980-an oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) ITB melalui konsep Kawasan Industri Sampah (KIS) dan sempat diuji coba di beberapa kota dengan mekanisme daur ulang agar sampah yang terangkut ke TPA dapat berkurang jumlahnya<sup>25</sup>.

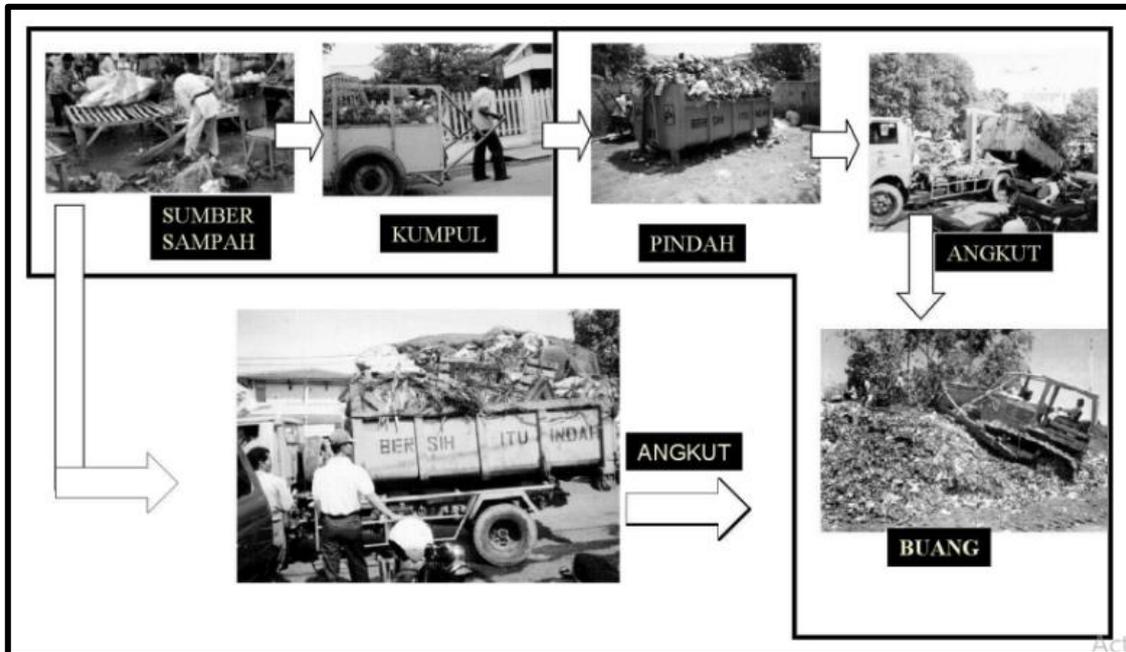


---

<sup>24</sup> Sujarwo, dkk., *Pengelolaan Sampah Organik & Anorganik*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Yogyakarta, 2014), hlm. 6.

<sup>25</sup> Enri Damanhuri dan Tri Padi, "Pengelolaan Sampah", *Diktat Kuliah TL-3104 Edisi 2010/2011*, (Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, 2010), hlm. 9.

**Gambar 1.**  
**Pola Pengelolaan Sampah Kumpul-Angkut-Buang.**



Sumber: Enri Damanhuri dan Tri Padmi, "Pengelolaan Sampah", *Diktat Kuliah TL 3104 Edisi 2010/2011*, (Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, 2010), hlm.9

Konsep sejenis juga dikembangkan sekitar tahun 1991 di Jakarta melalui Usaha Daur-ulang dan Produksi Kompos (UDPK), namun tidak berjalan lancar karena membutuhkan kesiapan dan alih pandang masyarakat maupun pemerintah kota setempat terkait penanganan sampah. Masih pada ruang lingkup yang sama, Direktorat Teknologi Lingkungan – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga mengemukakan konsep *zero waste* yang bisa dilakukan dari hulu hingga hilir.<sup>26</sup> Menurut Sri Bebasari (BPPT, 2003) dalam Yunarti (2004:43) *zero waste* merupakan prosedur pengelolaan sampah yang saling terintegrasi melalui pendekatan multi-aspek mulai dari pengaplikasian teknologi, kajian lingkungan, pertimbangan ekonomi, serta keterlibatan

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

aktif masyarakat guna menekan laju peningkatan volume sampah dan minimalisasi anggaran dengan optimalisasi keterbatasan peralatan untuk memperpanjang umur TPA.<sup>27</sup>

Pembabakan berikutnya ihwal manajemen pengelolaan sampah terus mengalami perkembangan, baik dari segi pemilahan dan pewadahan hingga penatalaksanaan tingkat akhir yang mengedepankan asas keterpaduan.<sup>28</sup> Indikator yang melandasi sistem pengelolaan sampah perkotaan yang termaktub dalam Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengenai Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan di antaranya dipengaruhi karena faktor penyebaran dan kepadatan penduduk; bentuk fisik dan kondisi sosial ekonomi; jumlah dan karakteristik sampah; *habit* dan budaya masyarakat; perhitungan jarak dari sumber ke TPA; rencana tata ruang dan pengembangan kota; sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir; ketersediaan biaya, hingga regulasi atau aturan dari masing-masing pemerintah daerah.<sup>29</sup>

Menukul UU-18/2008 yang mengatur mengenai penyelenggaraan persampahan mengklasifikasikan tata kelola sampah menjadi tiga bagian, yaitu sampah rumah tangga<sup>30</sup>, sampah sejenis sampah rumah tangga<sup>31</sup>, dan sampah spesifik.<sup>32</sup> Pengelolaan sampah hasil

---

<sup>27</sup> Irman, "Evaluasi Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Sistem Teknik Operasional Pengelolaan Sampah di Kota Padang, *Tesis*, (Semarang: Magister Teknik Pembangunan dan Wilayah Kota, Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 32-33.

<sup>28</sup> Badan Standarisasi Nasional, *Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*, (Jakarta: BSN, 2002), hlm. 3.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

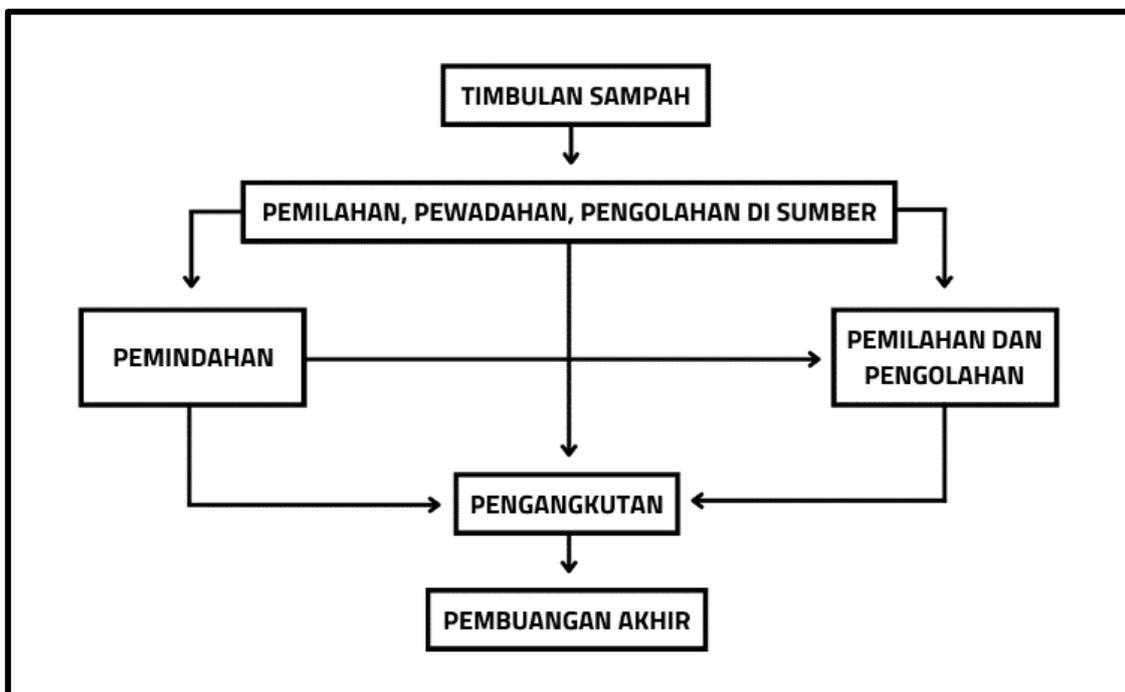
<sup>30</sup> Menurut UU-18/2008 menerangkan bahwasanya sampah rumah tangga merupakan timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas atau kegiatan yang berlangsung dari unit rumah tangga kecuali tinja dan sampah spesifik, *Op. Cit.*, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, hlm. 5.

<sup>31</sup> Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sumber sampah yang dihasilkan dari suatu kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> Sampah spesifik ialah jenis sampah yang membutuhkan *treatment* khusus dalam pengelolaannya, seperti sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang

produksi rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat diminimalisir melalui kegiatan pengurangan dan penanganan.<sup>33</sup> Sementara itu di sisi lain tata kelola sampah spesifik berdasarkan peraturan tersebut menjadi domain pemerintah kabupaten/kota.<sup>34</sup>

**Gambar 2.**  
**Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Sampah.**



Sumber: Badan Standarisasi Nasional, *Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*, (Jakarta: BSN, 2002), hlm 4. (Diolah kembali oleh penulis).

timbul karena terjadinya suatu bencana, puing-puing pembongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara periodik, *Loc.Cit.*

<sup>33</sup> Langkah pengurangan timbulan sampah yang dihasilkan dapat ditempuh melalui kegiatan pembatasan jumlah sejak dari sumbernya, melakukan aktivitas daur ulang hingga pemanfaatan kembali benda atau barang yang masih memiliki nilai guna. Sementara itu tindakan penanganan dari pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan dengan cara pemilahan dan pengelompokan sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya, kemudian dilakukan pengambilan dan pemindahan baik ke TPS atau TPST dan selanjutnya dikirim ke TPA untuk diolah dan dilakukan pemrosesan, *Ibid.*, 13-15.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Upaya pembenahan dan perbaikan berkelanjutan terkait tata kelola sampah yang berlangsung sekarang dalam perjalanannya bukan lagi memandang sampah sebagai suatu produk yang sama sekali tanpa manfaat, melainkan justru mampu memberikan *value* dan keuntungan lain. Selain menjaga kelestarian dan estetika lingkungan, pembatasan jumlah timbulan melalui usaha pengurangan volume produksi (*reduce*), memanfaatkan kembali segala sesuatu yang masih bisa digunakan (*reuse*), atau bahkan mendaur ulang setiap benda atau barang yang dapat diolah menjadi produk turunan (*recycle*) ini kemudian dikenal dengan istilah 3R.<sup>35</sup> Sejatinnya sampah juga dapat menyuguhkan nilai ekonomi yang bisa dirasakan multi-pihak, baik segmen kecil maupun besar apabila diolah dan dikelola dengan baik dan benar.<sup>36</sup>

Pengelolaan sampah merupakan proses hilirisasi produk buangan yang dihasilkan masyarakat. Dimulai dari tahap pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, hingga pengolahan. Sasaran dari langkah-langkah tersebut yaitu bertujuan untuk mengendalikan sejumlah tumpukan sampah agar tidak berpengaruh terhadap kondisi lingkungan, kesehatan, dan keindahan.<sup>37</sup> Menurut (Kardono (2007:629), solusi dari pengelolaan sampah berkelanjutan ialah memadukan antara teknologi yang disesuaikan dengan kondisi lokal, artinya pengelolaan sampah diadaptasikan dengan kondisi sumber daya dan kebutuhan masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Sujarwo, dkk., hlm. 10.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 10-11.

<sup>37</sup> Ismal Effendy, *Loc.cit.*

<sup>38</sup> Rizki Puteri Mahyudin, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)", *Jurnal, Teknik Lingkungan 3 (1)*, (Kalimantan Selatan, Prodi Teknik Lingkungan, Universitas Lambung Mangkurat, 2017), hlm. 69.

Indikator lain menunjang keberhasilan pelaksanaan penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara menggeser konstruk berpikir masyarakat agar tidak lagi hanya sekedar membuang sampah begitu saja, melainkan membatasi atau menekan laju pertumbuhan volume sampah. Mengkondisikan sampah atau limbah dari produk rumah tangga atau sektor lainnya dengan melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik agar bisa didaur ulang/dijadikan produk turunan.

Lebih lanjut pemerintah sebagai penyelenggara utama penanganan sampah dalam sub bidang pelayanan kebersihan, juga dapat membuat serangkaian aturan/kebijakan serta menunjuk atau membentuk badan/lembaga sebagai unit pelaksana teknis agar efektifitas pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Badan/lembaga tersebut memuat tenaga operasional, kelengkapan alat pendukung, hingga kawasan tempat pembuangan akhir dalam rangka mendukung pengelolaan persampahan kota.<sup>39</sup>

Pada dasarnya kota menampilkan corak kehidupan yang lebih beragam. Melalui keragaman tersebut dua diantaranya ialah proses produksi dan konsumsi di masyarakat yang berimplikasi terhadap hasil buangan (sampah) yang menjadi masalah sejak dulu. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang tahun 2008, mengungkapkan pelayanan persampahan baru mencapai 75 persen dari volume sampah yang dihasilkan, sedangkan sisanya tidak dapat dijangkau atau dilayani seutuhnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ade Fia Rahmawati, dkk., *Op.cit.*, hlm. 8-11.

<sup>40</sup> Bapedalda, *Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Padang (SLHD Kota Padang)*, (Padang: Badan Pengendalian dampak Lingkungan Hidup Daaerah Kota Padang, 2008), hlm. VIII-7.

Penelitian ini secara esensial mengarah kepada studi mengenai sejarah perkotaan. Latar belakang termasuk ke dalam kategori tersebut ialah karena hubungan antara aktivitas mekanis dari jaringan pengelolaan sampah perkotaan di bawah naungan unit sentra pelayanan kebersihan yang terpaut dengan pemerintah daerah. Bertautan dengan hal tersebut juga diulas hal-hal yang berkaitan dengan *habit* masyarakat, spesifik mengarah kepada warga Kota Padang, *problem* yang ditimbulkan, regulasi dan upaya pemerintah dalam mengurai sirkulasi sampah. Fokus penelitian ini dapat dikatakan menysasar pada ekologi kota, di mana pada konteks ini ialah terkait interaksi antara manusia dengan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan maupun struktur kota itu sendiri. Mengutip Ilham Daeng Makkelo dalam jurnal “Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis”, *research history about ecological city* adalah transformasi dari aspek sosial, ekonomi dan budaya maupun perwujudan atas kompleksitas berbagai bidang yang terus bergerak.<sup>41</sup>

#### **F. Metode dan Sumber Penelitian**

Penelitian ilmiah yang dilakukan dalam berbagai bidang keilmuan memiliki kerangka dan aturan yang mengikat. Seperti halnya ilmu sejarah yang memiliki metodologi dan metode yang menjadi rujukan penelitian.<sup>42</sup> Berdasarkan fungsinya metodologi berkaitan dengan pendekatan-pendekatan atau teori yang diaplikasikan, sedangkan metode adalah cara atau teknik menunjang proses penelitian.

---

<sup>41</sup> Ilham Daeng Makkelo, “Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis”, *Jurnal, Lensa Budaya* Vol. 12 No.2, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2017), hlm. 92-97.

<sup>42</sup> Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 1-2.

Tahap awal dari metode sejarah adalah heuristik, yaitu mengumpulkan sumber atau bukti-bukti terkait. Karena tanpa sumber suatu peristiwa atau fenomena sejarah sulit ditelusuri, walaupun mungkin kebenarannya lemah.<sup>43</sup> Sebagai gerbang utama penelitian sejarah, sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian ini pun dikumpulkan. Lebih lanjut untuk mencari arsip mengenai kondisi geografis dan demografis Kota Padang sesuai batasan pokok penelitian dilaksanakan dengan mengunjungi kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Setelah penelusuran dilakukan ditemukan salinan lembaran daerah yang telah dibukukan dan diterbitkan pada tahun 1990 mengenai pengelolaan sampah di Kota Padang. Selain itu sumber lain juga diperoleh melalui kunjungan langsung ke perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, perpustakaan pusat Universitas Andalas, perpustakaan Daerah Sumatera Barat, serta beberapa sumber yang diakses secara digital melalui iPusnas, *google scholar*, dan *e-library*.

Berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti tertulis, pada tahap ini juga dilakukan penelitian lapangan untuk menangkap peristiwa sejarah yang terjadi di masyarakat melalui proses dialog dengan pihak terkait atau yang bersinggungan langsung dengan topik penelitian. Hasil yang diperoleh melalui metode wawancara tersebut menyoal kepada pejabat pemerintah yang berada pada periode kepemimpinan Walikota Hasan Basri Durin (1973-1983) hingga Mahyeldi Ansharullah (2014-2019) yang mengerucut kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang.

Memasuki tahap kedua, setelah sejumlah sumber berhasil terakumulasi, langkah berikutnya yaitu kritik sumber dengan tujuan menguji keaslian dan kredibilitas bahan

---

<sup>43</sup> A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 46-47.

yang telah ditemukan.<sup>44</sup> Proses uji validasi atau verifikasi tersebut terdiri dari kritik eksternal yang menyoal kepada keautentikan data, sedangkan kritik internal lebih mengarah kepada makna atau isi yang terkandung di dalamnya.<sup>45</sup> Hal ini bertujuan untuk menangkap informasi sezaman atas peristiwa yang telah terjadi berdasarkan bukti-bukti yang ada.<sup>46</sup> Kritik sumber pada penelitian lebih mengarah kepada arsip terbitan pemerintah kota/instansi yang bersinggungan langsung dengan pokok penelitian. Karena arsip adalah sumber primer dari produk sejarah.<sup>47</sup> Tidak lupa pula dilakukan penyaringan atau seleksi terhadap buku, artikel, atau karya ilmiah sejenis yang tidak relevan.

Setelah sumber berhasil terkumpul, kritik dijalankan guna melihat sejauh mana memiliki nilai dan pengaruh, kemudian tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu menafsirkan fakta-fakta sejarah agar dapat direkonstruksi dalam upaya ekplanasi sejarah. Karena fakta sejarah yang hadir acapkali tidak lengkap, tidak teratur, bahkan berserakan. Oleh sebab itu fragmen yang semulanya terpecah, disusun kembali hingga menghadirkan makna yang faktual dan logis atas rekaman kejadian peristiwa masa silam.<sup>48</sup> Berdasarkan temuan bukti dan arsip ini dilakukan analisis dan rekonstruksi terhadap pengalaman historis yang termaktub dari berbagai sumber. Tujuannya tidak lain yaitu untuk menarik kesimpulan dan menemukan jawaban dari batasan penelitian yang telah diajukan.

Tahap akhir dari keseluruhan rangkaian yang telah dilalui ialah historiografi yang menjadi medium komunikasi hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti menyajikan laporan

---

<sup>44</sup> Sugeng Priyadi, *Op.cit.*, hlm. 62.

<sup>45</sup> A. Daliman, *Op.cit.*, hlm. 60.

<sup>46</sup> Mona Lohanda, *Membaca Sumber Menulis Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 3.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>48</sup> A. Daliman, hlm. 60.

hasil temuan dari awal hingga akhir meliputi masalah-masalah yang harus dijawab.<sup>49</sup> Sedangkan signifikansi dari historiografi adalah untuk memaparkan peristiwa sejarah yang telah berhasil diungkapkan sebagai tahap akhir melahirkan karya sejarah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I dalam penulisan ini merupakan pengantar yang memberikan latar belakang kenapa penelitian diangkat. Irisan dan pokok permasalahan tentang substansi hingga tujuan serta manfaat penelitian. Kemudian tinjauan pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan, kerangka analitis sebagai konstruksi berpikir yang menjadi landasan, metode dan sumber penelitian, serta sistematika dalam penulisan.

Bab II membahas mengenai keadaan geografis dan demografis Kota Padang, struktur ekonomi hingga riwayat sentra pelayanan kebersihan kota yang sempat mengalami pengintegrasian dan pengembangan guna menopang jalannya beragam program kebersihan yang telah berlangsung di Kota Padang.

Bab III secara khusus membahas mengenai perkembangan pengelolaan persampahan dari masa pemerintahan Hasan Basri Durin hingga Mahyeldi Ansharullah yang secara eksplisit berkelanjutan untuk dan saling menyempurnakan, baik dari sisi kajian kelayakan dan dampak lingkungan seperti pernah terjadinya pemindahan Kawasan TPA, invoasi yang diterapkan hingga pengembangan dan otomatisasi peralatan yang diaplikasikan.

Bab IV menguraikan perihal permasalahan dan tantangan yang dihadapi kota Padang dalam mengurai sirkulasi sampah dari hulu hingga hilir. Tantangan tersebut

---

<sup>49</sup> Sugeng Priyadi, *Op.cit.*, hlm. 79.

sebenarnya meliputi banyak aspek, baik ditingkat individu, rumah tangga/keluarga, lingkungan, serta persoalan lain seperti penerapan kebijakan yang belum dapat berjalan optimal.

Bab V merupakan akhir atau penutup yang memberikan gambaran ringkas atau berisi rangkuman dari seluruh pembahasan dari hasil penelitian, di samping itu pada bagian ini juga memuat saran serta jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan di dalam rumusan masalah.

